

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 1.1 Kesimpulan

Timor Portugis adalah nama resmi daerah Timor Timur sebelum integrasi dengan Indonesia. Portugal tercatat sebagai bangsa Eropa pertama yang menginjakkan kaki di daerah Timor-Timur dan terus mempertahankan kehadirannya sampai pada tahun 1702, daerah ini di deklarasikan sebagai koloni Portugis. Perubahan di Portugal Revolusi Anyelir (bahasa Portugis: *Revolução dos Cravos*) (bahasa Inggris: *Carnation Revolution*), juga dikenal sebagai *25 de Abril* (25 April), adalah sebuah kudeta yang bermula pada tanggal 25 April 1974, di Lisboa, Portugal, bersamaan dengan kampanye resistansi sipil yang meluas dan tidak tertanggulangi. Bangsa Portugis merayakan Hari Kebebasan setiap tanggal 25 April, dan hari tersebut menjadi hari libur nasional di Portugal. Nama "Revolusi Anyelir" berasal dari fakta bahwa tidak ada tembakan yang diletuskan dan ketika orang-orang mulai turun ke jalanan untuk merayakan akhir kediktatoran dan perang di wilayah-wilayah jajahan, bunga anyelir diletakkan di moncong senjata dan juga di seragam.

Peristiwa ini secara efektif mengubah rezim Portugis dari kediktatoranotoriter (*Estado Novo*) menjadi demokrasi, dan menghasilkan perubahan besar pada sendi-sendi sosial, ekonomi, kewilayahan, kependudukan, dan politik di negara ini, setelah dua tahun masa peralihan yang disebut sebagai PREC, *Processo Revolucionário Em Curso*, atau *Proses Revolusioner yang Sedang Berjalan*), dicirikan oleh gejolak sosial dan sengketa kekuasaan antara kekuatan politik sayap kiri dan kanan. Meskipun terdapat upaya-upaya pengimbang yang berulang-ulang dari kaum revolusioner melalui seruan radio kepada rakyat agar tetap diam di rumah, ribuan orang Portugis turun ke jalanan, bercampur baur dengan

pihak militer yang memberontak. Kudeta yang dipimpin oleh militer ini berhasil mengembalikan demokrasi kepada Portugal, mengakhiri Perang Kolonial yang tidak memihak kepada rakyat di mana ribuan serdadu Portugis diwajibkan mengemban tugas kemiliteran, dan mengganti rezim otoriter *Estado Novo* (Negara Baru) dan polisi rahasianya yang menekan kebebasan sipil dan kebebasan politik yang bersifat asasi.

Kejadian ini bermula sebagai protes kelas profesional dari para kapten Angkatan Darat Portugis melawan sebuah undang-undang dekret: *Dec. Lei nº 353/73* tahun 1973. Sekelompok petugas Portugis berpangkat rendah yang terhimpun dalam *Movimento das Forças Armadas (MFA – Pergerakan Angkatan Darat)*, termasuk unsur-unsur yang telah turut berjuang memerangi gerilyawan pro-kemerdekaan di wilayah Imperium Portugis di Afrika, bangkit untuk mengambil-alih kekuasaan dari korporat dan otoritarian rezim *Estado Novo* yang telah memerintah Portugal sejak dasawarsa 1930 an.

kesuksesan Revolusi Anyelir di ikuti dengan merdekanya wilayah-wilayah jajahan Portugal. Fenomena "merdeka massal" tersebut tak lepas dari kebijakan pemerintahan baru Portugal yang berpikir bahwa mempertahankan wilayah-wilayah jajahannya terutama wilayah jajahan yang sedang dilanda pemberontakan hanya akan membebani perekonomian Portugal ke depannya. Wilayah-wilayah jajahan Portugal yang dimerdekakan tersebut antara lain Angola, Guinea Bissau, Mozambik, Sao Tome dan Principe, Tanjung Verde dan Timor. Khusus untuk Timor, wilayah tersebut sempat menjadi provinsi ke-27 Indonesia sebelum kemudian benar-benar merdeka pada tahun 2002. Saat menarik diri dari wilayah jajahannya, Portugal juga ikut serta dalam membantu pembentukan pemerintahan baru di wilayah bekas jajahannya tersebut. Hal yang patut diperhatikan adalah kendati Portugal mengklaim berusaha bersikap netral, fakta di lapangan menunjukkan bahwa Portugal lebih condong mendukung kelompok-kelompok yang berhaluan kiri kemungkinan karena pemerintahan

Portugal pasca-Revolusi juga berhaluan kiri seperti FRELIMO (Mozambik), Fretilin (Timor Leste), dan MPLA (Angola).

Sikap Portugal ini lantas memunculkan kritikan dari pihak-pihak luar karena berpotensi menimbulkan gesekan di masa depan bila masih ada pihak yang merasa dipinggirkan. Selain mendapat kritik seputar kecenderungan "pilih kasih" saat membantu proses pembentukan badan pemerintahan baru di wilayah-wilayah bekas jajahannya, Portugal juga dikritik karena cenderung lepas tangan setelah wilayah jajahannya tersebut benar-benar melepaskan diri dan dilanda masalah baru. Ketika timbul perang sipil di Angola dan Mozambik misalnya, Portugal dianggap tidak benar-benar berusaha mendamaikan pihak-pihak yang bertikai. Sikap cuek Portugal sendiri kemungkinan besar karena pasca Revolusi Anyelir, pemerintahan baru Portugal lebih berkonsentrasi untuk membenahi pekerjaan-pekerjaan rumah dalam negerinya.

Kebijakan Portugal untuk menarik diri sesegera mungkin dari wilayah-wilayah jajahannya membawa konsekuensi tersendiri bagi para perantauan Portugal di wilayah-wilayah jajahan tersebut. Karena merasa takut akan menjadi sasaran kemarahan dari para etnis lokal yang dilanda euforia kemerdekaan, para perantauan tersebut berbondong-bondong kembali ke Portugal dengan tergesa-gesa dan hanya membawa harta benda seadanya. Para perantauan yang kembali ini lantas dikenal dengan nama "retornados" (mereka yang kembali). Ketika jumlah para retornados ini semakin bertambah, keberadaan mereka menjadi masalah baru bagi pemerintah Portugal karena menambah angka pengangguran di negara tersebut. Diperkirakan, jumlah total para retornados berkisar antara 500.000 hingga 1 juta jiwa. Di Dili orang-orang Timor yang tertarik politik mulai memikirkan pembentukan serikat politik, dan mengadakan berbagai pertemuan untuk membahas prinsip-prinsip dan Domingos Oliveira, mantan Sekjen UDT, memberi kesaksian tentang perasaan marah rakyat Timor dengan pernyataan ini, di Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik

Politik Internal 1974-1976, 15-18 Desember 2003. Begitu terbentuk, serikat-serikat tersebut secara efektif berfungsi sebagai partai-partai politik, meskipun secara teknis partai-partai politik masih dilarang beroperasi.

Hak penentuan nasib sendiri untuk semua wilayah jajahan juga dicantumkan sebagai suatu kewajiban bagi negara Portugal dalam konstitusi tahun 1975, ketentuan ini terbukti menjadi penting dalam melanjutkan komitmen resmi Portugal atas penentuan nasib sendiri rakyat Timor Timur dalam tahun-tahun selanjutnya yang berat. Pembentukan partai-partai politik di Timor Timur mendengarkan kesaksian yang menggambarkan bagaimana Revolusi Bunga segera menggelorakan perhatian rakyat Timor Timur mengenai masa depan politik wilayah tersebut. Garis besar politik Portugal khususnya terhadap Timor Timur adalah melaksanakan dekolonisasi untuk maksud pemerintahan Portugis yang baru memberikan kelonggaran kepada rakyat Timor Timur untuk mendirikan partai-partai politik guna menyalurkan aspirasi mereka tentang bagaimana dekolonisasi itu harus dilaksanakan.

## **1.2 Saran**

Permasalahan di Timor adalah permasalahan yang sangat kompleks. Karena kompleksnya permasalahan itu, maka setiap peneliti harus melihat Timor dari berbagai sisi sehingga didapatkan suatu penjelasan yang lebih mendalam dan menyeluruh. Permasalahan di Timor berputar pada konflik yang terjadi antara pemerintah Indonesia dengan kelompok pro kemerdekaan, pro integrasi dan konflik internasional. Kepada peneliti selanjutnya, melihat kondisi itu setidaknya dapat memanfaatkan celah tersebut untuk mengkaji lebih dalam tentang permasalahan di Timor Timur.